

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Pendapatan Daerah	12
2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah	13
2.2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.2.3 Dana Perimbangan	21
2.2.3.1 Dana Bagi Hasil	21
2.2.3.2 Dana Alokasi Umum.....	23
2.2.3.3 Dana Alokasi Khusus.....	26
2.2.4 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	28
2.2.4.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	28

2.2.4.2	Struktur Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto.....	28
2.2.4.3	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usahanya	29
2.2.4.4	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Andil Faktor-Faktor Produksi	29
2.2.4.5	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Jenis Penggunaan	31
2.2.4.6	Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto	33
2.2.4.7	Penyajian Atas Dasar Harga Konstan	35
2.2.4.8	Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	36
2.2.5	Tingkat Kemiskinan	38
2.2.5.1	Garis Kemiskinan.....	38
2.2.5.2	Garis Kemiskinan BPS.....	39
2.2.5.3	Garis Kemiskinan Sajogyo.....	41
2.2.5.4	Garis Kemiskinan Bank Dunia.....	42
2.2.5.5	Garis Kemiskinan BKKBN.....	42
2.2.5.6	Penyebab Kemiskinan.....	43
2.2.6	Belanja Daerah.....	45
2.2.7	Perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah.....	49

2.3	Kerangka Pikir	51
-----	----------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	52
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.3	Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Obyek Penelitian.....	64
4.1.1	Dana Alokasi Umum.....	64
4.1.2	Belanja Daerah.....	64
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	65
4.2.1	Perkembangan Dana Alokasi Umum.....	66
4.2.2	Perkembangan PDRB.....	67
4.2.3	Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	69
4.2.4	Perkembangan Belanja Pegawai.....	70
4.3	Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik.....	72
4.3.1	Analisi dan Pengujian Hipotesis.....	76
4.3.2	Uji Hipotesis Secara Simultan.....	77
4.3.3	Uji Hipotesis Secara Parsial.....	80
4.4	Pembahasan.....	85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87

ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN DANA ALOKASI UMUM DI JAWA TIMUR

ABSTRAK

Oleh:

Heru Prayogo

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata. Salah satunya adalah dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi indikator bahwa Pemerintah Daerah belum dapat menggali potensi yang ada di daerahnya dengan optimal untuk menjadi sumber pemasukan di Daerah yang bersangkutan. Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada faktor faktor yang mempengaruhi penyusunan Dana Alokasi Umum. Diantaranya menggunakan variabel penelitian yaitu : PDRB, Tingkat Kemiskinan dan Belanja Pegawai. Hasil yang didapat adalah PDRB dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum, sedangkan Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum. Ternyata variabel yang mempengaruhi Penyusunan Dana Alokasi Umum adalah PDRB, karena bersentuhan langsung dengan pendapatan daerah.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, PDRB, Tingkat Kemiskinan, Belanja

Pegawai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 menetapkan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Saragih, 2003 :200).

Pemerintah nampaknya menyadari adanya masalah tersebut. Karenanya beberapa tahun kemudian dikeluarkan lagi peraturan perundangan yang juga mengatur otonomi daerah tetapi dengan prinsip selektifitas, hanya daerah yang dinilai mampulah yang diberi kesempatan berotonomi. Upaya tersebut juga mengalami kegagalan karena pemerintah tidak secara sungguh-sungguh berusaha meningkatkan kemampuan daerah. Daerah yang dinilai

mampu pun sebenarnya belum memiliki kemampuan minimal untuk berotonomi. (Khusaini, 2002 :24).

Dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian dilengkapi lagi dengan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut dinilai banyak kalangan sebagai jawaban strategis di tengah merebaknya aspirasi-aspirasi kedaerahan yang berujung pada munculnya tuntutan pemisahan diri. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah harus mampu mengakomodasi tuntutan daerah dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya. (Suparmoko, 2000:97).

Sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang terdiri:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan daerah
 - 4) Penerimaan lain-lain dan pendapatan dinas-dinas
- b. Dana perimbangan
 - 1) Pinjaman daerah
 - 2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah (Widjaja 2002:130).

Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Anonim, 2004:xxiii)

Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Di samping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan Dana Darurat. Undang-undang ini selain memberikan landasan pengaturan bagi pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar daerah. (Solihin, 2001:170). Empat puluh persen dari penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi disediakan kepada daerah sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah dengan penyediaan Dana Pendamping 10% yang berasal dari penerimaan umum APBD (kecuali untuk DAK Reboisasi). (Kuncoro, 2004:35)

Berdasarkan data yang didapat dilihat struktur penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dimana kontribusi terbesar terhadap total penerimaan disumbang dari bagian pendapatan dana perimbangan, dimana pada APBD 2004 kontribusinya sebesar 76,65% terhadap total penerimaan. Komponen terbesar adalah DAU yaitu sebesar 58,31%. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah tersebut merupakan upaya pemerintah mengurangi atau memperkecil

kesenjangan fiskal antar daerah. Komponen berikutnya yang memberikan sumbangan terbesar setelah Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar 8,54%. Sedangkan bagi hasil pajak memberikan kontribusi sebesar 7,25%. Kontribusi terkecil yang termasuk dalam dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 2,56% (BPS, 2008:58).

Berdasarkan data yang didapat, diketahui Penerimaan Daerah dalam APBD Jawa Timur tahun 2008, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2007 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,51% dari Rp 1.300.442.644.000 menjadi Rp 1.219.282.122.000 pada tahun 2008. Jika dilihat dari struktur penerimaan dimana kontribusi terbesar terhadap total penerimaan disumbang dari bagian pendapatan dana perimbangan, dimana pada tahun 2008 kontribusinya sebesar 55,12% dengan nilai Rp 496.551.091.000 yang mengalami penurunan sebesar 2,8% dibanding tahun 2007 dengan nilai Rp 343.894.948.000. Komponen terbesarnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 25,94%. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan sebesar 3,2% dengan nilai Rp 320.230.000.000 pada tahun 2007 sedangkan pada tahun 2008 dengan nilai Rp 322.178.000.000. Komponen berikutnya yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagi hasil pajak sebesar 19,18%. Bagi hasil pajak mengalami penurunan sebesar 9,94% dengan nilai Rp 280.933.035.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 253.000.000.000 pada tahun 2008. Sedangkan bagi hasil bukan pajak memberikan kontribusi sebesar

0,1%. Bagi hasil bukan pajak tahun 2007 sebesar Rp 1.391.913.000 yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,63% dengan nilai Rp 1.383.091.000 pada tahun 2008 (BPS, 2008:58).

Sesuai dengan judul penelitian ini, “Analisa Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Dana Alokasi Umum di Jawa Timur” maka penelitian dititikberatkan pada faktor- faktor yang mempengaruhi penyusunan Dana Alokasi Umum di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengkaji latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penyusunan Dana Alokasi Umum di Jawa Timur.
- b. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap penyusunan Dana Alokasi Umum di Jawa Timur.
- c. Apakah Belanja Pegawai berpengaruh terhadap penyusunan Dana Alokasi Umum di Jawa Timur.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penyusunan Dana Alokasi Umum di Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap penyusunan Dana Alokasi Umum di Jawa Timur.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pegawai terhadap penyusunan Dana Alokasi Umum di Jawa Timur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dicapai, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Dana Alokasi Umum.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemda dan pemerintah dalam penyusunan Dana Alokasi Umum.
- c. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan Dana Alokasi Umum.